

IMPROVEMENT QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS THROUGH APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND GOOD GOVERNANCE

Nurmiati¹, Bastian Lubis²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Patria Artha,
Email_nurmiati@patria-artha.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Patria Artha,
Email_lubis.bastian@gmail.com

ABSTRACT

The Study aims to analyze improvement quality of financial report through application of governance accounting standards and good governance. Analyzed the data obtained by using analysis quantitative. Quantitative analysis includes multiple regression analysis, coefficient of determination analysis and hypothesis through t test and f test. The results of research and statistical analysis using shows that the quality of financial statements is influenced by the application of government accounting standards and good governance.

Keywords : *Quality of Financial Statement, Government Accounting Standards, Good Governance*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Isu *Good Governace* (pemerintahan yang baik) merupakan wacana yang banyak dibicarakan saat ini mulai dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah hingga bagaimana menjalankan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan yang diambil pemerintah pro terhadap rakyat ataukah malah bersifat oportunis bagi sang pemangku jabatan. Semakin tingginya tuntutan masyarakat agar instansi pemerintahan menyelenggarakan prinsip-prinsip *Good Governace* berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

Definisi laporan keuangan menurut Mahmudi (2010: 1) merupakan suatu

bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan Mardiasmo (2004: 159) mendefinisikan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini sebagai

acuan bagi penyusun laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Mursyidi, 2009).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017 diserahkan ke DPRD Kabupaten Gowa. Pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran perubahan tahun anggaran 2017 oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD Kabupaten Gowa,

mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat penyerahan rancangan peraturan daerah menjelaskan, terkait anggaran yang mendapatkan perubahan rancangan pendapatan daerah Kabupaten Gowa mengalami kenaikan sebesar Rp 244.952.111.676 atau 16,03% dari anggaran pokok sebesar Rp 1.528.331.162 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp 1.773.283.273.873.

Pendapatan daerah ini dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung mengalami kenaikan Rp 31.550.900.302 naik sekitar 3.60% dari anggaran pokok sebesar Rp 877.221.727.967 menjadi Rp. 908.772.628.270. Untuk belanja langsung peningkatan sebesar Rp 279.311.383.198 mengalami penambahan sekitar 42.17%, dari anggaran pokok Rp

662.320.132.475 menjadi Rp Moderasi Good Governance
941.631.515.674. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan

Dalam anggaran perubahan ini Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep kami juga telah memasukkan integrasi bahwa efek moderasi *good governance* BPJS yang akan mulai berlaku pada mampu meningkatkan kinerja Oktober 2017. Selain itu terkait PP pengelolaan keuangan dengan variabel nomor 18 tahun 2017 terkait hak independen kompetensi sumber daya keuangan dan administratif pimpinan dan manusia dan teknologi informasi, anggota DPRD. Perubahan pada walaupun jika secara langsung baik anggaran ini dilakukan untuk variabel kompetensi sumber daya menyesuaikan kondisi dan situasi manusia maupun teknologi informasi perkembangan daerah, yang mengacu tidak berpengaruh secara signifikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kinerja pengelolaan Kabupaten Gowa tahun 2017. Perubahan keuangan daerah pemerintah Kabupaten kami prioritaskan Satuan Kerja Perangkat Pangkep.

Daerah yang memang mengalami pengurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pokok 2017 serta kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak (Pemkab Gowa).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmiati, 2017 yang berjudul Efek

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar peningkatan kualitas laporan keuangan melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Standar Akuntansi pemerintahan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang mengamankan tugas penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Adapun tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP

kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

- c. Selain menyusun SAP, KSAP bertugas mempersiapkan, mengkaji, melakukan riset terbatas dan menerbitkan berbagai publikasi yang berhubungan dengan standar, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi yang diterbitkan oleh KSAP untuk memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pelaporan keuangan, (UU No.17, 2003, pasal 32 ayat 1. Dan No. 71, 2010).

Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan

keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, SAP digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan diterapkannya Standar akuntansi Pemerintahan di setiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan yang diterbitkan. Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan

mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat

diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah

tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Konsep Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Isu *Good Governace* (pemerintahan yang baik) merupakan wacana yang banyak dibicarakan saat ini mulai dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah hingga bagaimana menjalankan kebijakan tersebut.

Good governance menurut Bank Dunia sebagai cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan masyarakat. (Nurmiati, dkk, 2017).

Semakin tingginya tuntutan masyarakat agar instansi pemerintahan menyelenggarakan prinsip-prinsip *Good Governace* berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Ada tiga komponen utama *Good Governace* yaitu:

1) Transparansi

Instansi pemerintahan bisa dikatakan jujur ketika instansi tersebut telah menjalankan prinsip transparansi. Hal tersebut bisa terwujud dengan menampilkan laporan keuangan secara penuh tanpa menyembunyikan atau menutupi suatu kecurangan yang dilakukan instansi tersebut.

2) Partisipasi

Pemerintahan yang baik tidak boleh lepas dari unsur partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi kualitas informasi akan semakin tinggi jika masyarakat di ikut sertakan untuk

menilai laporan instansi pemerintah. Sehingga masyarakat juga jadi lebih tahu mengenai kinerja instansi pemerintah yang menaungi daerahnya.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas instansi pemerintahan merupakan instrumen untuk mengontrol pencapaian instansi tersebut.

Apakah instansi yang bersangkutan sudah mencapai target yang di tentukan sebelumnya atau kah malah instansi tersebut tidak memiliki pencapaian selama periode masa kerjanya.

Konsep Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Laporan Keuangan instansi pemerintah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Instansi pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan instansi pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- 4) Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- b) Andal
Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - 3) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c) Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

- d) Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanasi, dimana penelitian eksplanasi adalah penelitian untuk menguji hubungan antarvariabel yang di hipotesiskan, ada hipotesis yang diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya.

Jenis Data

- a) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Instansi baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis. Seperti gambaran singkat perusahaan dan struktur organisasi.
- b) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah yang diteliti dalam bentuk angka – angka.

Sumber Data

- a) Data Primer
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini data primer berupa hasil pengisian kuesioner oleh Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk menunjang informasi yang diperlukan dalam kajian yang berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap obyek penelitian dan untuk menganalisisnya secara tepat.

Populasi dan Sampel

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berjumlah

sebanyak 324 orang. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling* dengan mengambil 76 orang pegawai sebagai sampel dengan menyiapkan daftar pertanyaan (kuesioner).

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independent dan variabel dependent, dimana variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah dan *Good*

Governance sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

Analisis Data

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dan untuk menguji pengaruh variabel *independen* (variabel bebas) terhadap variabel dependen digunakan metode analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2012:215) dengan rumus:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

\hat{Y} : Kualitas laporan keuangan

X_1 : Standar Akuntansi Pemerintahan

X_2 : *Good Governace*

a : Konstanta

b_1 : slope regresi atau koefisien regresi dari X_1

b_2 : slope regresi atau koefisien regresi dari X_2

e : kesalahan residual (error turn)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut **Koefisien Determinasi (R^2)** hasil uji koefisien determinasi pada Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tabel berikut :

Tabel 1. Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,770 ^a	,593	,581	2,34512

a. Predictors: (Constant), GoodGovernance, StandarAkuntansiPemerintahan

b. Dependent Variable: KualitasLaporanKeuangan

Sumber : output SPSS 24, 2017

Tabel 1. *Model Summary* kolom R menunjukkan besarnya koefisien korelasi ganda sebesar 0,770. Kolom *R Square* (R^2) merupakan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,593. Kolom *Adjusted R Square* (R^2) merupakan koefisien determinasi yang dikoreksi/ disesuaikan yaitu besarnya 0,581 dan koefisien ini yang digunakan dalam memberikan makna bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan 58,1% (0,581 x 100%) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

1. Uji parsial (t)

Uji parsial atau biasa juga dikatakan uji t (t-test) merupakan teknik pengujian hipotesis dengan melihat pengaruh variabel secara terpisah. Pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen akan di uji

secara terpisah, dalam artian setiap variabel X di uji pengaruhnya terhadap variabel Y. dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen dan variabel independen yang kedua adalah *Good Governance* (X_2) yang akan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan yang juga merupakan variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,954	5,292		,747	,457
1 StandarAkuntansiPemerintahan	,281	,060	,401	4,689	,000
GoodGovernance	,681	,114	,509	5,961	,000

a. Dependent Variable: KualitasLaporanKeuangan

Sumber : output SPSS 24, 2017

Tabel 2 kolom *Unstandardized Coefficients* dengan subkolom *B* merupakan koefisien yang menunjukkan harga *constant a*, b_1 dan b_2 . Dari ketiga koefisien ini kemudian dimasukkan dalam persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ sehingga persamaan regresi menjadi :

$$Y = 3,954 + 0,281 X_1 + 0,681 X_2$$

Pada model regresi yang telah didapatkan dengan taksiran diatas, yaitu maka memperlihatkan bahwa taksiran itersep a sebesar 3,954 dan taksiran parameter dari b_1 sebesar 0,281 dan taksiran parameter dari b_2 sebesar 0,681. Penjelasan dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konstanta = 3,954, artinya ada atau tidaknya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good governance*, maka kualitas laporan keuangan tidak akan mengalami perubahan baik bertambah ataupun berkurang (tetap).
 b. Koefesien regresi $X_1 = 0,281$, artinya jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintah meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,281.
 c. Koefesien regresi $X_2 = 0,681$, artinya adalah jika *Good Governance* meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,681.
 d. Koefesien regresi $X_2 = 0,681$, artinya adalah jika *Good Governance* meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,681.
- Penjelasan lain dari hasil persamaan tersebut dapat berarti bahwa, jika penerapan Standar Akuntansi Pemerintah bertambah satu tingkatan maka kualitas laporan keuangan rata-rata akan meningkat sebesar 0,281 dan *Good Governance* bertambah satu tingkatan maka kualitas laporan keuangan rata-rata akan meningkat sebesar 0,681.

2. Uji Simultan (F)

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	544,618	2	272,309	49,514	,000 ^b
Residual	373,974	68	5,500		
Total	918,592	70			

a. Dependent Variable: KualitasLaporanKeuangan

b. Predictors: (Constant), GoodGovernance, StandarAkuntansiPemerintahan

Sumber : output SPSS 24, 2017

Tabel 3. menunjukkan hasil uji simultan. Untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dengan melakukan

uji F. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka bisa dikatakan bahwa X_1 dan X_2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Nilai F_{hitung} pada tabel diatas yaitu 49,514 sedangkan nilai F_{tabel} yaitu 3.13. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($49,514 > 3.13$) maka disimpulkan bahwa pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Hasil persamaan regresi dengan bantuan alat statistik SPSS 24, koefisien regresi untuk variabel independent yaitu Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1) dilakukan pengujian keberartian dengan uji t.

Nilai t_{tabel} dengan signifikansi 5% dan nilai df 69 (N-2) atau (71-2) adalah 1,669. Pada tabel 2 nilai t_{hitung} variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) adalah 4,689. Untuk variabel X_1 nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,689 > 1,669$) maka H_1 diterima atau dapat diinterpretasikan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) secara parsial mempengaruhi variabel Kualitas laporan keuangan (Y). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,00 < 0,05$) menyatakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Pemerintah Kabupaten Gowa salah satu kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah masalah relevansi. Kata relevan mengacu kepada dampak dari informasi dan pengaruhnya kepada keputusan ekonomi pemakai laporan dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu sehingga informasi yang relevan dapat memberikan manfaat umpan balik dan prediktif. Dengan itu setiap instansi pemerintah agar kiranya dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang agar laporan keuangan baik dan benar.

Diterimanya H_1 yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gowa, hal ini memperkuat dan sejalan dengan penelitian tentang pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat), dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai,

maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang semakin baik maka akan dibarengi oleh kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula, Dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Good Governance (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Hasil persamaan regresi dengan bantuan alat statistik SPSS 24, koefisien regresi untuk variabel independent yaitu *Good Governance* (X_2) dilakukan pengujian keberartian dengan uji t.

Nilai t_{tabel} dengan signifikansi 5% dan nilai df 69 ($N-2$) atau (71-2) adalah 1,669. Pada tabel 2. nilai t_{hitung} variabel *Good Governance* (X_2) adalah 5,961. Untuk variabel X_2 nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,961 > 1,669) maka H_2 diterima atau

dapat diinterpretasikan bahwa variabel *Good Governace* (X_2) secara parsial mempengaruhi variabel Kualitas laporan keuangan (Y). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,00 < 0,05$) menyatakan bahwa variabel *Good Governance* (X_2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Variabel *good governance* telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan di setiap instansi. Hal ini menunjukkan *Good Governance* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku sebab sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Diterimanya H_2 yaitu *Good Governance* (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gowa, ini menguatkan dan sejalan dengan penelitian sebelumnya, dalam

penelitiannya menyatakan ada pengaruh variabel *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan, dengan berdasarkan Hasil uji F nilai F sebesar 10,507 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, variabel kualitas aparatur pemerintahan dan *good governance* secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

Hasil uji simultan Pada tabel 3 dengan bantuan alat statistik SPSS 24, koefisien regresi untuk variabel independent yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good*

Governance (X2) dilakukan pengujian terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai Ftabel dengan signifikansi 5% dan nilai df untuk responden sebanyak 71 adalah 3,13. Pada tabel 4.22 nilai Fhitung Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan variabel Good Governance (X2) adalah 49,514. Karena Fhitung > Ftabel (49,514 > 3,13) maka H0 ditolak. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf kesalahan 5% ($0,00 < 0,05$) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan variabel Good Governance (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) secara bersama-sama hasil ini berbanding terbalik dengan hipotesa yang diajukan oleh peneliti.

Pemerintah Daerah setiap daerah harus menggunakan dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dan Good Governance agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar. Di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

tersebut mengelola dana terpisah untuk menatausahakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi, pada Sekretariat, Dinas, dan Badan (Lembaga Teknis) telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengakuntansikan semua transaksi yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah-nya masing-masing.
2. Menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah baik laporan Semester maupun untuk Laporan Akhir Tahun.

Dalam penelitian ini terdapatnya perbedaan hasil uji SPSS dengan hipotesa yang diajukan oleh peneliti yang dimana hasil uji SPSS diterimanya H₀ yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan (Y) secara simultan atau bersama-sama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gowa, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} . Artinya bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah di uji melalui SPSS. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu instansi pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* maka kualitas laporan keuangan tidak diragukan lagi oleh pihak auditor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan X_1 secara parsial mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan Y. Hal ini menunjukkan ketaatan dalam menerapkan Standar Akuntansi pemerintahan akan sangat

menunjang kualitas laporan keuangan yang disajikan dalam rangka menggambarkan keadaan sebenarnya dari sebuah instansi.

2. Good

Governance X_2 secara parsial mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan Y. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip prinsip *Good Governance* akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan. Sehingga para pengguna laporan keuangan tidak tersesat oleh informasi salah yang disajikan.

3. Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan (X_1) dan Good Governance (X_2) tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan Y, hipotesa yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan hasil dari uji SPSS yang dimana kualitas laporan keuangan akan semakin baik jika

kedua variabel X_1 dan (X_2) diterapkan bersama sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

Saran

Para pengguna anggaran dan para pengguna barang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dalam membuat laporan keuangan menjunjung tinggi prinsip prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan yang dibuat memiliki kualitas di mata pengguna informasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dalam membuat laporan keuangan agar menerapkan prinsip *Good Governance* sehingga laporan keuangan yang disajikan bebas dari rekayasa untuk menutupi kecurangan pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Irvan, N., Mus, A. R., Su'un, M., & Sufri, M. (2017). Effect of Human Resource Competencies,

Information Technology and Internal Control Systems on Good Governance and Local Government Financial Management Performance.

Mahmudi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yoyakarta: Andi Offset.

Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/4585043>

Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Nurmiati, N. (2017). Efek Moderasi Good Governance Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep. In *Assets* (Vol. 7, pp. 230–245).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dalam Mencegah
Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*,
4(1).

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian
Kuantitatif kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta, 124.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good
governance dan standar akuntansi
pemerintahan terhadap
akuntabilitas keuangan dengan
komitmen organisasi sebagai
pemoderasi. *Jurnal Reviu
Akuntansi Dan Keuangan, 1(1)*,
21–36.